



<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/7297>

## KOTA KOLONIAL HINDIA BELANDA 1800-1942: DITINJAU DARI PERMASALAHAN SEJARAH PERKOTAAN

**Dewi Ratih**

Universitas Galuh, Indonesia

Email koresponden: [dewiratih@gmail.com](mailto:dewiratih@gmail.com)

*Sejarah Artikel: Diterima 7 Maret 2022 Disetujui 18 April 2022 Dipublikasikan 30 April 2022*

### Abstrak

Studi mengenai sejarah perkotaan dewasa ini selalu dipertanyakan karena perspektif dan metodologi yang tidak terikat oleh salah satu bidang keilmuan. Kota pada awalnya adalah sebuah wilayah biasa, artinya sebuah wilayah kecil dengan berpenduduk sedikit dan biasa kita kenal dengan nama desa. Namun lama-kelamaan desa mengalami perubahan secara terus-menerus dan konsep perkotaan mulai lahir. Proses tersebut cepat atau lambat menghadirkan beberapa permasalahan karena setiap manusia memiliki cara untuk mengikuti perubahan dan menyesuaikan diri. Perubahan antara desa dan kota tentu mempunyai proses yang sangat berbeda, perubahan di desa dapat dikatakan lambat karena rangsangan faktor eksternal yang ada tidak dapat diprediksikan. Sedangkan perubahan kota sangatlah cepat karena dipicu oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat. Substansi permasalahan kota kolonial jika ditinjau dari permasalahan sejarah perkotaan dapat dianalisis menggunakan paradigma Bergel, dimana perubahan atau perkembangan suatu wilayah kecil atau desa berubah menjadi desa mengalami fase evolusi dari desa hingga kota metropolitan.

**Kata Kunci:** Desa, Sejarah Perkotaan, Kota Kolonial

### Abstract

The study of urban history today is always questionable because of the perspectives and methodology that are not bound by any of the fields of science. The city was originally an ordinary territory, meaning a small area with few inhabitants and we used to know the name of the village. Over time, however, the village experienced continuous change and the urban concept was born. The process sooner or later presents some problems because every human being has a way to keep up with changes and adjust. The change between the village and the city certainly has a very different process, the change in the village can be said to be slow because the existing external factor stimuli can not be predicted. While the change of the city is very fast because it is triggered by rapid technological developments. The substance of the colonial city's problems in terms of urban history can be analyzed using Bergel's paradigm, where the change or development of a small area or village turns into a village undergoing an evolutionary phase from the village to the metropolis.

**Keywords:** Village, Urban History, Colonial City

### PENDAHULUAN

Keberadaan kota di dunia telah muncul ketika awal peradaban manusia. Dibuktikan dengan artefak yang ditemukan di Mesopotamia. Peradaban ini lebih dahulu dibanding dengan

Peradaban di Mesir. Dengan ditemukan reruntuhan kuil-kuil, irigasi yang tersistematis memperlihatkan konsep perkotaan awal. Sungai besar Eufrat dan Tigris yang mengalir dengan muara terpisah ke Teluk Persia. Diantara kedua

sungai itulah orang-orang Sumeria membangun kota-kota mereka. Eksistensi kota yang sudah muncul sejak ribuan tahun lalu akhirnya mengalami perubahan yang berbeda. Beberapa kota tetap ada dan eksistensinya masih hadir, namun ada pula kota yang sudah punah. Kota yang sudah punah ini hanya meninggalkan tinggalan-tinggalan dalam bentuk artefak yang menjadi bahan atau sumber dari kajian keilmuan untuk menelusuri peradaban manusia pada masa tersebut. Di Indonesia pada masa Hindu-Budha eksistensi kota kerajaan tertulis dengan gambaran megah didalam naskah-naskah yang tertinggal, seperti eksistensi Trowulan kota bekas Kerajaan Majapahit atau Kawali kota bekas Kerajaan Sunda Galuh. Melihat begitu pentingnya peran kota dalam perkembangan peradaban manusia, maka kota sebagai objek harus terus tumbuh dan berkembang.

Kota pada dasarnya merupakan sebuah wadah dari berbagai aspek kehidupan yang sangat kompleks. Dewasa ini teori tentang kota terus-menerus bermunculan dibarengi dengan perhatian berbagai hal yang ikut bergerak bersama perkembangan kota tersebut. Secara teori Bergel menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan perkembangan desa menjadi sebuah desa. Beberapa istilah tersebut diantaranya adalah:

- 1) *Village* (desa), pada umumnya desa diartikan sebagai tempat permukiman para petani, terlepas dari besar atau kecilnya daerah tersebut. Ciri utama dari desa adalah antara desa satu dengan desa yang lain tidak saling mendominasi atau tidak menguasai satu sama lain juga tidak saling mempengaruhi.
- 2) *Town* (kota kecil), Bergel menjelaskan bahwa kota kecil telah mendominasi pedesaan

dalam berbagai segi. Beberapa karakteristik pokok kota kecil adalah: mendominasi desa, memiliki derajat *homogenitas* yang hampir menyerupai desa sekitar dan ketatnya sistem pengawasan sosial, juga *konservatisme* yang ekstrem.

- 3) *City* (kota besar), suatu permukiman perkotaan yang mendominasi sebuah kawasan (*region*) yaitu pedesaan dan perkotaan. Dalam beberapa hal perbedaan antara *city* dengan *town* bersifat gradual, artinya berbeda dalam jumlah tingkatan, *city* lebih bersifat kompleks, memiliki tingkat diferensiasi yang tinggi.
- 4) *Metropolis* (kota yang hidup), batasan Metropolis awalnya berdasarkan jumlah penduduk, kota yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 dan memiliki kualitas urban. Namun kota besar lama-kelamaan serupa dengan karakter metropolis, akhirnya Batasan perbedaan antara metropolis dengan kota adalah arti internasional dan supranasional (Basundoro, 2012: 20-21).

Menurut Wiryomartono, berdirinya kota-kota di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari proses terbentuknya permukiman-permukiman awal diberbagai tempat. Permukiman-permukiman ini ada yang menjadi kota dengan berbagai dorongan dari unsur-unsur eksternal. Sebagian besar kota-kota di Indonesia tercipta karena faktor dari luar (*ekstren*), khususnya ketika era atau masa kolonialisme dan imperialisme. Dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang memudahkan kepentingan ekonomi dan politik negara induk rel kereta api, perluasan dan pembuatan jalan juga jaringan hubungan air sungai dan pantai diubah oleh

pemerintah kolonial. Kota merupakan campuran dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang sangat kompleks, maka secara teoritis penggambaran tentang kota sangat rumit. Seperti, Bandung yang menjadi salah satu kota kolonial dikarenakan ciri khas dari kota kolonial adalah konsentrasi kekuatan sosial, ekonomi dan politik berada di tangan pemerintah kolonial. Hal ini dapat dilihat dari tinggalan bangunan kolonial yang berbaris dan tertata rapi di beberapa daerah pusat kota Bandung (Wardani, 2016: 29).

Kota Bandung pada masa pemerintah kolonial menjadi salah satu *gemeente* (pemerintah kota). Pada pertengahan abad ke-20 Provinsi Jawa Barat oleh pemerintah kolonial membentuk lima karesidenan dengan ibu kota Batavia. Provinsi Jawa Barat pada masa pemerintah kolonial abad ke-20 wilayahnya terdiri dari 5 karesidenan, 18 kabupaten dan kotapraja (*stadsgementen*).

A. Karesidenan Banten terdiri atas:

1. Kabupaten Serang
2. Kabupaten Pandeglang
3. Kabupaten Lebak

B. Karesidenan Batavia:

1. Kabupaten Batavia
2. Kabupaten Meester Cornelis
3. Kabupaten Karawang

C. Karesidenan Bogor:

1. Kabupaten Bogor
2. Kabupaten Sukabumi
3. Kabupaten Cianjur

D. Karesidenan Priangan:

1. Kabupaten Bandung
2. Kabupaten Sumedang
3. Kabupaten Garut
4. Kabupaten Tasikmalaya

5. Kabupaten Ciamis

E. Karesidenan Cirebon:

1. Kabupaten Cirebon
2. Kabupaten Kuningan
3. Kabupaten Indramayu
4. Kabupaten Majalengka

F. Kotapraja (*stadsgemeente*):

1. Batavia
2. Messter Cornelis
3. Buitenzorg
4. Bandung
5. Cirebon
6. Sukabumi (Herlina, 2013: 80-81).

Menurut Lombard. (2008) ketika orang-orang Eropa yang paling awal tiba di Indonesia Penjelasan ini merujuk kepada orang-orang Portugis dan Cornelis de Houtman orang Belanda yang singgah ke pelabuhan Malaka dan Banten. Namun gambaran awal tentang topografi dan perdagangan di Asia semakin jelas, ketika sejumlah pedagang Bataaf bergabung pada tahun 1602 dan mendirikan “Sarekat Perseroan Hindia Timur” (*Vereenigde Oostindisch Compagnie*) atau biasa disingkat dengan VOC. VOC merupakan badan yang kuat, yang mengawasi perdagangan Belanda, tidak hanya di Nusantara, tetapi juga di Srilanka dan kawasan yang merentang dari Tanjung Harapan hingga Jepang. VOC dipimpin dari Amsterdam oleh Dewan Persero, “de Heeren” atau Dewan 17 (ke-17 tuan-tuan) hingga akhir abad ke 18, mereka tidak menemukan kawasan kosong tanap penghuni. Sebagian besar ketika orang Eropa mendarat di kota-kota pinggir pantai sudah cukup maju dan ada kekuasaan secara formal di kawasan tersebut, yaitu para penguasa tradisional. Kota kolonial pertama yang

Ratih, D. (2022). Kota Kolonial Hindia Belanda 1800-1942: Ditinjau Dari Permasalahan Sejarah Perkotaan. *Jurnal Artefak*, 9 (1), 49 - 60

dibangun oleh orang-orang Belanda adalah adalah Batavia pada tahun 1619, dan tahun itu dianggap sebagai fase baru dalam perkembangan

kota-kota di Indonesia, karena memulai sebuah tahap perkembangan yang cepat (Nas, 2007: 304).



Gambar 1: Jan Pieterszoen Coen  
Gubernur Jendral yang Membangun Batavia

Jan Pieterszoen Coen diangkat menjadi Gubernur Jendral pada tahun 1618. Ia memilih pelabuhan Batavia sebagai pusat jaringan perdagangan Belanda di Asia. Di bandar Jawa Barat yang banyak dibicarakan oleh Tomé Pires dan cukup sering disinggahi oleh orang Portugis dan Cina. Pada tahun 1610 VOC mendirikan loji dan pada tahun 1619 garnisun kecil yang menempati loji itu membebaskan diri dari perwalian Pangeran Jayakarta, yang sekurang-kurangnya secara nominal adalah bawahan Sultan Banten, lalu memusnahkan kota pribumi yang ada beserta mesjidnya dan mendirikan kota Batavia dengan membangun sebuah benteng (Lombard,2008: 61).

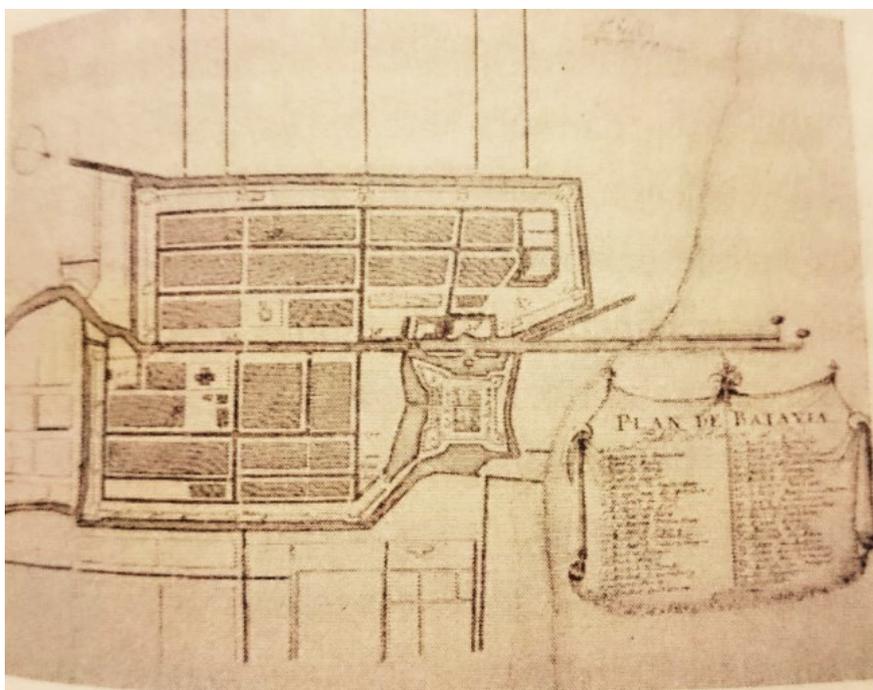
### Perkembangan Kota Kolonial

Pada tanggal 30 Mei 1619 VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoen Coen ini menyerang dan menghancurkan kota Jayakarta. Penyerangan tersebut dilakukan karena kedatangan pasukan Banten yang ingin mengusir orang-orang Belanda, namun mereka (pasukan Banten) yang dikalahkan dan terusir oleh orang-orang Belanda. Setelah sukses VOC melakukan penyerangan ke Jayakarta, kekuasaan di Jayakarta sepenuhnya jatuh ke tangan Belanda. VOC kemudian segera membangun kota tersebut sebagai koloni pertama mereka di pulau Jawa. Beberapa sumber menyebutkan tidak ada

satupun bangunan yang tersisa pasca penyerbuan, sehingga orang-orang Belanda nyaris membangun kota baru pada tahun-tahun sesudahnya sebagai kota yang bercirikan Eropa. Salah satu ciri kota yang dibangun oleh kolonial pada awal abad ke-17 adalah gaya bangunan Eropa yang mendominasi kawasan kota. Tipologi arsitektur dan Bahasa perancangan model Eropa yang memiliki empat musim dicangkokkan langsung ke kawasan tropis di Indonesia (Basundoro, 2012: 88).

Beberapa bangunan yang memiliki tipologi Eropa antara lain: pos-pos perdagangan, benteng militer dan kota yang dilindungi oleh benteng. Alasan kemudian orang-orang Belanda segera membangun benteng di Batavia adalah ketakutan orang-orang Belanda sendiri kepada penduduk pribumi, jika sewaktu-waktu akan menyerang orang-orang Belanda. Disana orang-

orang Belanda membangun benteng yang dinamakan Benteng Batavia, yang memperlihatkan bahwa pada waktu itu kota tersebut merupakan kota didalam benteng. Tembok tebal mengelilingi kota Batavia dan di beberapa titik dibangun *bastion* (Bangunan yang digunakan untuk mengintai musuh.) dan diberi nama kota-kota yang berada di Belanda, seperti *Bastion* Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Hollandia, Grimerbergen dan lain-lain (Blackburn, 2001: 21). Ciri lain dari kota kolonial ialah adanya perencanaan kota yang cukup baik. Sehingga secara fisik kota-kota kolonial memiliki struktur yang lebih rapid an teratur. Sebelum Belanda membangun kota Batavia, mereka mempersiapkan terlebih dahulu rencana kota Batavia dengan sebuah rancangan yang sangat baik dan rancangan tersebut diberinama *plan de Batavia*.



Gambar 2: Rencana (Desain) Awal Pembangunan Kota Batavia

Sumber: Campbell, 1915. Basundoro, (2012: 91)

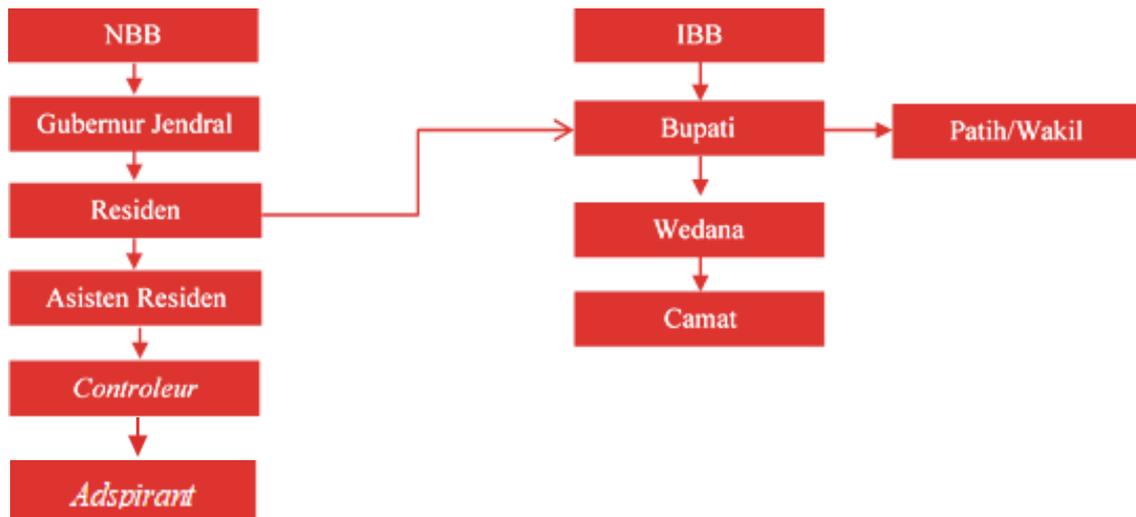
Seiring dengan perkembangannya, ketika kongsi dagang VOC dibubarkan pada tahun 1799, tanah koloni Belanda di Indonesia akhirnya langsung dikelola oleh pemerintah Belanda. Perkembangan perencanaan kota semakin baik pada awal abad ke-19. Raffles yang berkuasa dengan waktu yang relatif singkat dapat merubah tata kota kolonial di Hindia Belanda. dengan dibentuknya Dinas Pekerjaan Umum (*Burgerlijke Openbare Werken*) banyak melatih para arsitek sipil dan mengerjakan berbagai pekerjaan sipil di perkotaan, terutama bangunan perkantoran dan sarana kepentingan umum lainnya, seperti pasar, rumah sakit, sekolah, sarana olah raga, makam, mercusuar dan lain-lain. Departemen Pekerjaan Umum Sipil atau yang biasa disingkat BOW adalah salah satu dari empat departemen urusan umum yang didirikan berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 21 September 1866 melalui lembaran negara Hindia Belanda (*Staatsblad*. No. 127).

BOW adalah Badan Hukum kelanjutan dari *Bureau van Openbare Werken* (Biro Pekerjaan Umum) yang didirikan pada tahun 1854. Sejalan dengan kebijakan sistem tanam paksa (*culturstelsel*), sangat efektif, efisien dan berhasil baik jika menggunakan penanganan profesional infrastruktur di tingkat pusat. Beberapa tugas BOW adalah pengelilaan pengairan (*waterstaat*), jalan (*wegen*), pekerjaan umum sipil negara (*'s lands burgerlijke openbare werken*), sistem tenaga uap, termasuk

pemeriksaan mesin uap dan pemantauan penggunaannya (*stoomwezen, inclusief de inspectie van stoomwerktuigen en het toezicht op het gebruik ervan*, telegraf (*telegrafie*), jawatan kereta api (*spoorwagen*), pengurus pegawai yang bekerja di semua jawatan itu (*de zorg voor het personeel dat bij al deze dienstonderdelen werkte*) (Anrooij, 2014: 230).

Puncak dari perencanaan kota-kota di Hindia Belanda pada masa kolonial setelah disahkannya undang-undang desentralisasi pada tahun 1903. Berdasarkan undang-undang tersebut dibentuklah kota-kota otonom yang menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, tidak bergantung kepada pemerintah pusat di Batavia. Kota-kota otonom tersebut diberi status *gemeente* dan berkembang kemudian menjadi *stadsgemeente*, dengan status baru tersebut maka pemerintah kota tersebut diberi keleluasaan untuk mengembangkan kotanya (Basundoro, 2014: 93). Kebijakan desentralisasi pun berdampak kepada sistem pemerintah kolonial secara politik. Beberapa hirarkis kekuasaan di Hindia Belanda kemudian terbagi dua. Satu hirarki pemerintah yang hanya dijabat oleh orang-orang Belanda dan merupakan korps dari *Nederlandsch Binnenlands Bestuur* (NBB) dan hirarkis pemerintahan yang melibatkan penduduk pribumi, merupakan korps *Inlandsche Binnenlandsch Bestuur* (IBB).

**Bagan 1: Sistem Pemerintahan Hindia Belanda**



Terdapat tiga ciri yang harus diperhatikan untuk dapat memahami struktur ruang lingkup sosial kota kolonial, yaitu budaya, teknologi dan struktur kekuasaan kolonial. Kota-kota kolonial yang besar seperti Batavia, Semarang, Surabaya dan Bandung memiliki keterkaitan erat dengan tiga aspek tersebut. Keterbukaan sebuah kota dengan pusat pemerintahan dan perdagangan mengharuskan adanya perkembangan komunikasi dan teknologi pada masa pemerintahan kolonial. Dalam perjalanan kunjungan di berbagai kota pada tahun 1923, Berlage menyebutkan bahwa kota Semarang adalah kota terbagus dan terbersih di Pulau Jawa. Hal ini tidak saja karena rencana perluasannya merupakan hasil karya Plate dan Kaarsten, tetapi juga desain bangunan-bangunan dibuatnya dengan perubahan besar. Contoh, bangunan perkantoran dan rumah yang bagus dan bergaya *indis*, baik di luar maupun di pinggiran kota. Dalam memperhatikan keserasian kota Semarang, Kaarsten berupaya menggunakan percobaan dengan ilham bangunan pedesaan. Semuanya diciptakan oleh Kaarsten dengan

rekayasa desain kota seperti di negeri Belanda (Soekiman, 2011: 109).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan dan penelitian jurnal ilmiah ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah suatu usaha untuk mempelajari dan mengenali fakta-fakta serta menyusun simpulan mengenai peristiwa masa lalu. Tujuannya adalah untuk membuat rekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif (Gottschalk, 2008. Garraghan, 1957: 34). Tahapan penelitian dalam metode sejarah sendiri terbagi menjadi empat. Tahap pertama adalah heuristik. Heuristik adalah tahapan awal yang dilakukan setelah menentukan topik atau permasalahan penelitian. Heuristik sendiri adalah proses mencari, menemukan dan menghimpun sumber-sumber sejarah yang terkait dengan pokok permasalahan. Tahap pencarian sumber dilakukan terhadap sumber tertulis (*studi literatur*), sumber benda dan lisan. Sumber tertulis berupa arsip, sumber resmi tercetak,

dokumen, buku dan lain-lain. Arsip ditelusuri di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pencarian sumber primer yang sezaman berbentuk sumber resmi tercetak, surat kabar dan buku dilakukan di beberapa perpustakaan, antara lain: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPUSIPDA), Perpustakaan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Ilmu Keguruan (FKIP) Universitas Galuh dan Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah di FKIP Universitas Galuh Ciamis. Di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia penelusuran sumber tertulis dikhususkan kepada pencarian sumber sezaman, seperti surat kabar. Di perpustakaan BAPUSIPDA, FKIP Universitas Galuh dan Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Galuh Ciamis dikhususkan kepada pencarian sumber sekunder (buku-buku) pendukung penelitian sumber sejarah perekonomian pada masa kolonial.

Tahap kedua, adalah kritik sumber. Kritik sumber dalam metode sejarah terbagi menjadi dua. Diantaranya adalah kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menentukan otentisitas sumber dengan cara memberikan penilaian terhadap kondisi fisik sumber tersebut, seperti jenis kertas yang digunakan, tinta, tulisan, huruf, *watermark*, stempel dan sebagainya. Kritik intern dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap kondisi fisik sumber tersebut. Selain itu, akan dilakukan pula proses membandingkan data yang sudah ada di dalam sumber tersebut dengan data yang ada di dalam sumber tersebut dengan sumber lainnya.

Tahap ketiga dalam metode penelitian *historis* yang akan digunakan oleh penulis dalam

penelitian jurnal ilmiah ini adalah interpretasi. Interpretasi adalah proses menafsirkan berbagai fakta menjadi sebuah rangkaian yang logis. Pada tataran operasionalnya interpretasi dilakukan secara analitis yakni mengurai fakta dan dilakukan secara sintesis yaitu menghimpun fakta. Pemahaman secara verbal tidak memadai untuk menginterpretasikan informasi yang terkandung di dalam sumber sejarah. Fakta yang diperoleh diinterpretasikan baik secara verbal, teknis, logis, faktual dan psikologis. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan dapat dipahami secara menyeluruh dan mendalam.

Tahap selanjutnya adalah tahapan terakhir dalam penulisan sejarah menggunakan metode *historis*, Historiografi. Historiografi adalah tahapan penulisan sejarah. Fakta yang telah diinterpretasikan kemudian dituliskan dalam penulisan yang sistematis dan kronologis. Historiografi yang akan dihasilkan dibagi menjadi beberapa pembahasan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan menggunakan metode sejarah, penulis mendapat panduan bagaimana teknis penelitian jurnal ilmiah ini dapat dikerjakan secara efektif dan akurat. Efektif dalam pengertian tahapan demi tahapan dikerjakan dengan terperinci. Akurat dalam pengertian hanya sumber yang telah menjadi fakta sejarah yang dapat dijadikan bahan penulisan jurnal ilmiah ini. Selain itu, unsur diakronis yang menunjukkan sejarah, sebagai ilmu tentang berfikir dalam waktu sangat diperhatikan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

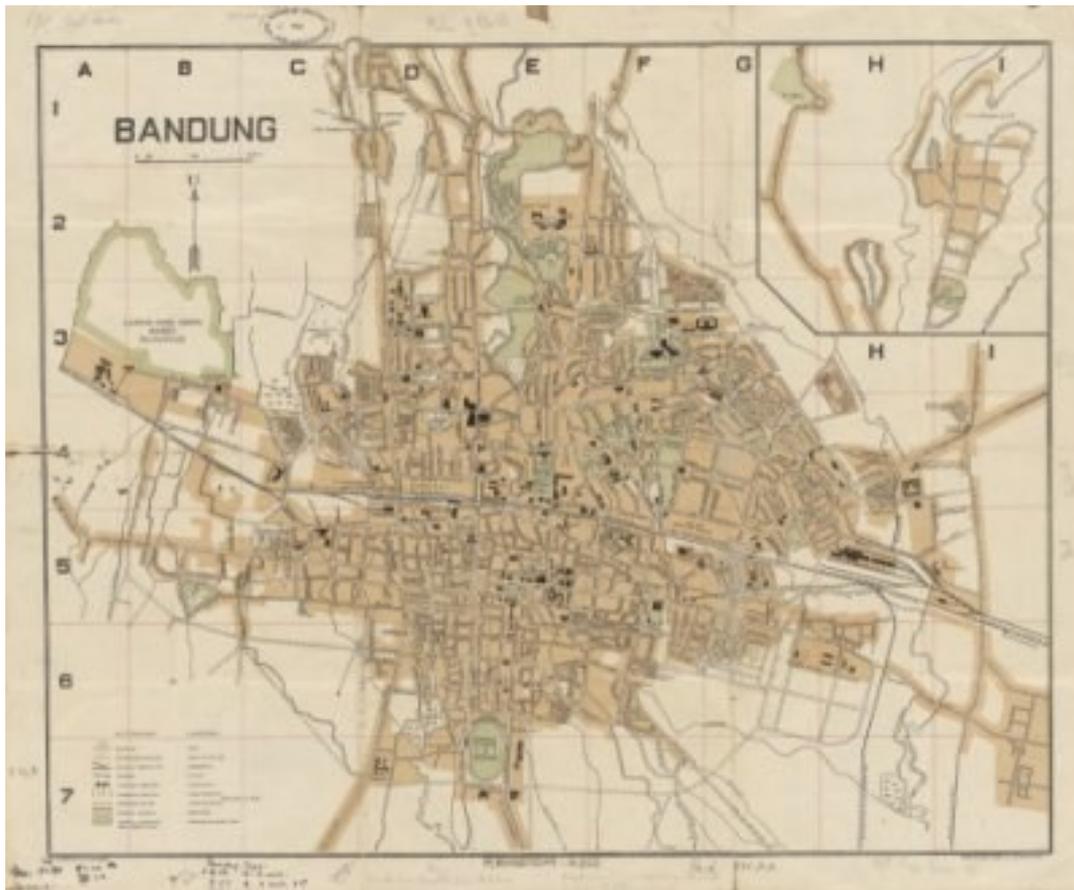
### Permasalahan Kota Kolonial

Beberapa kota besar di Indonesia harus menanggung beban di Indonesia harus menanggung beban berat akibat kenaikan penduduk terutama yang disebabkan oleh arus migrasi. Hal ini disebabkan karena pada masa pemerintah kolonial kota-kota yang berkembang hanya sedikit. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya hanya Batavia, Bandung, Semarang dan Surabaya yang dapat dikatakan maju dan berkembang. Namun pada prinsipnya kondisi kota tersebut tidak pernah dirancang untuk menampung lonjakan penduduk dalam jumlah yang demikian tinggi. Pada awal abad ke-20, para perancang kota bahkan merancang dan mengangankan kota Batavia hanya untuk 900.000 jiwa (Pamungkas, 2001). Namun pada kenyatannya rancangan kota yang diperuntukan 900 ribu jiwa tersebut tidak pernah terwujud. Pemerintah kolonial tidak bisa menekan laju urbanisasi masyarakat pedesaan ke Batavia. Akhirnya Batavia menjadi kota yang mendapat

tekanan jumlah penduduk paling banyak (Basundoro,2013: 11).

Idealnya jumlah penduduk dengan tata kota yang diharapkan pada masa kolonial dirancang untuk kepentingan kolonial sendiri, bukan untuk kepentingan secara umum. Perkembangan di kota Bandung, memasuki awal abad ke-20 perkembangan jumlah penduduk semakin meningkat bersamaan dengan datangnya orang-orang Eropa. Kota Bandung sendiri berubah ketika dimulainya Herman Willem Daendels merencanakan pembangunan jalan raya pos yang terbentang sepanjang Pulau Jawa. Sekitar 800 mil (1.100 kilometer) dikerjakan oleh pemerintah kolonial. Tujuan utama pembangunan jalan itu adalah untuk kelancaran hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui surat (hubungan pos), maka jalan tersebut dikenal dengan nama *Grote Postweg* atau jalan raya pos (Hardjasaputra, 2002: 27) [ebook].

**Gambar 3 : Topografi Bandung**



Sumber: <http://www.KITLV.net>, diakses pada 16 Mei 2017 pukul 11.25

Kebiasaan orang-orang Eropa yang dibawa dari negeri Belanda pun sangat terlihat ketika pemerintah kolonial membangun fasilitas seperti jalan beraspal, penerangan, air, bersih, kendaraan, trem, kantor pos, rumah took, barak militer, gereja dan sebagainya. Selain kompleksitas, gaya hidup orang-orang Eropa ikut terbawa sampai ke Hindia Belanda, seperti contoh pada awal abad ke-19 orang-orang Eropa membuat suatu perkumpulan atau klub khusus yang diperuntukan orang-orang Eropa, klub tersebut dinamai *Concordia*. *Concordia* adalah klub (*Societet*), sebuah perkumpulan para pejabat tinggi militer. Pertama kali didirikan pada tahun 1830, dan kemudian ditempatkan di

sebuah gedung baru di Waterlooplein pada tahun 1889 (Lombard, 2008: 83). Menurut Brenda Yeoh, kota kolonial menampung masyarakat yang sangat beragam, heterogenitas di dalam tata kota terbagi menjadi orang Eropa, penduduk pribumi dan para pendatang. Mereka hidup menjadi satu di dalam satu kota, namun tempat dan posisi mereka terkotak-kotak berdasarkan perbedaan rasa tau warna kulit (Yeoh, 1996: 1).

Permasalahan ragam kota kolonial akhirnya menimbulkan segregasi ras. Perbedaan tempat tinggal yang didasarkan oleh warna kulit tersebut adalah sesuatu yang telah didesain oleh pemerintah kolonial, hal ini dilakukan karena mereka memiliki kepentingan. Dengan terpecah-

pecahnya warga kota berdasarkan ras agar dapat mengontrol mereka (penduduk pribumi), namun dalih yang digunakan pemerintah adalah menghindari konflik. Penduduk kota dibuat berlapis-lapis berdasarkan latar belakang ras, bahkan etnis. Lapisan pertama adalah orang-orang Eropa seperti Belanda dan lainnya, lapisan kedua adalah orang pendatang dari bangsa timur asing (Cina, Arab, India, Jepang) dan lapisan terakhir adalah penduduk pribumi. Pembagian tersebut merupakan hasil pemisahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagaimana tercantum dalam *Regering Reglement* tahun 1854 (Noordjanah, 2010: 11).

Penerapan dalam permukiman yang terpisah-pisah ini sengaja dan tidak diperbolehkan untuk membaaur satu sama lain. Dengan kebijakan ini maka di kota-kota terbentuklah kawasan khusus untuk orang-orang Eropa, kawasan Pecinan yang dihuni oleh orang-orang Cina, kawasan Kampung Melayu dan kawasan perkampungan Arab. Aturan mengenai pemusatan permukiman tersebut adalah *Staatsblad* yang terbit pada tahun 1871 No. 145. Pemisahan permukiman berdasarkan ras misalnya terjadi di Surabaya. Pertama, permukiman masyarakat Belanda dan Eropa yang terletak di sekitar Jembatan Merah dan Simpang. Kedua permukiman orang-orang Cina dan timur asing lainnya terletak di sebelah timur kawasan jembatan merah dan ketiga, penduduk pribumi tinggal di antara tanah-tanah yang tersisa atau dibalik gedung-gedung milik orang Eropa (Basundoro, 2012: 96-97). Di Kota Bandung penerapan permukiman yang terpisah-pisah berdasarkan ras terbagi menjadi tiga. Pertama, batas rel kereta api yang melintasi *grote postweg* (jalan merdeka saat ini) ke utara

adalah permukiman orang-orang Belanda. kedua permukiman orang-orang Cina dan asing berada di barat rel kereta api yang melewati *grote postweg* dan permukiman penduduk pribumi tinggal jauh dipinggiran kota Bandung. Perkampungan penduduk pribumi di Surabaya, Bandung dan Batavia sangat bertolak belakang dengan kondisi permukiman masyarakat Belanda dan Eropa, sehingga sumber permasalahan kota seperti masalah sanitasi, keindahan kota, penyakit dan lain-lain selalu menghantui warga kota. Disinilah rakyat miskin jelata tinggal dan menjadi simbol dari peembangan kota. Pemerintah kolonial, lebih mengedepankan kepentingan golongan mereka (orang-orang Eropa), rakyat miskin bumiputra menjadi korban pertama dalam sektor permukiman (Basundoro, 2012: 97)

## SIMPULAN

Lahirnya kemiskinan karena keterbatasan ruang kota pada masa kolonial melahirkan permasalahan baru. Hal ini lebih kompleks karena menyangkut ruang hidup penduduk pribumi yang menjadi korban. Kenyataannya jika penduduk pribumi yang bisa bertahan hidup di pinggiran kota dan menjadi korban kebijakan pengkotak-kotakan wilayah permukiman, dapat melahirkan beberapa solusi, pertama dengan aksi merebut ruang kota seperti yang dilakukan oleh penduduk pribumi di Surabaya jika terjadi kerusuhan atau permasalahan sosial, aksi rakyat miskin di Surabaya serentak merebut ruang-ruang publik kota dan dikuasai oleh mereka. Kedua penduduk pribumi yang tidak dapat

Ratih, D. (2022). Kota Kolonial Hindia Belanda 1800-1942: Ditinjau Dari Permasalahan Sejarah Perkotaan. *Jurnal Artefak*, 9 (1), 49 - 60

menahan beban permasalahan kota akan kembali ke desa.

Akhirnya permasalahan kota pada masa kolonial adalah rakyat miskin yang didominasi oleh penduduk pribumi sendiri. Akhirnya permasalahan kota dapat dilihat dari dua sisi, pertama kota dianggap menghasilkan dan sumber dari peradaban, disisi lain kota melahirkan masyarakat yang dianggap kurang beradab atau tepatnya orang-orang kalah yang berjuang untuk bertahan hidup. Kota dianggap sebagai tempat yang aman dan nyaman jika didesa terjadi pergolakan atau kerusuhan, disisi lain kota dianggap kejam bagi orang-orang yang tidak bisa menaklukkannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip, Dokumen Resmi Tercetak

*Staatsblad van Nederlandsch Indie. Jaar 1866.*  
No. 127.

### Buku:

Anrooij, Fv [terj: Nurhayu & Susi]. (2014). *De Koloniale Staat, 1854-1942*. Leiden. Nationaal Arcief.

Basundoro, P. (2014). *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Basundoro, P. (2013). *Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960*. Tangerang: Marjin Kiri

Blackburn, S. (2011). *Jakarta 400 Tahun*. Jakarta: Masup.

Garrghan, G. J. S.J. (1957). *A Guide to Historical Method Vol I & Vol II*. Fordham University Press: New York.

Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Herlina, N, et al. (2013). *Sejarah Kota-kota lama di Jawa Barat*. Bandung: Balai Pengelolaan Kepurbakalaan, Sejarah dan Nilai Tradisional, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan YMSI Cabang Jawa Barat.

Lombard, D. (2008). *Nusa Jawa Silang Budaya, Jilid I: Batas-batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dengan Forum Jakarta-Paris dan Ecole Francaise d'Extreme-Orient.

Nas. P.J.M. (2007). *Kota-Kota Indonesia: Bunga Rampai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Noordjanah, A. (2010). *Komunitas Tionghoa di Surabaya*. Yogyakarta: Ombak.

Pamungkas, G & Adolf Heuken. (2001). *Menteng: Kota Taman Pertama di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.

Wardani, T. (2016). *Mengabarkan Gerakan: Surat Kabar Anti Kolonialisme 1920-1926*. Ciamis: Kentja Press.

Yeoh, B. S.A. (1996). *Contesting Space: Power Realtions and the Urban Built Environment in Colonial Singapore*. Singapore: Oxford University Press.

### Tesis/Disertasi:

Hardjasaputra, S.A. (2002). *“Perubahan Sosial di Bandung 1810-1906*. Disertasi. Depok: PPS Universitas Indonesia [ebook].

### Internet:

Foto Koleksi KITLV dalam:

Ratih, D. (2022). Kota Kolonial Hindia Belanda 1800-1942: Ditinjau Dari Permasalahan Sejarah Perkotaan. *Jurnal Artefak*, 9 (1), 49 - 60

<http://www.KITLV.net>

Ratih, D. (2022). Kota Kolonial Hindia Belanda 1800-1942: Ditinjau Dari Permasalahan Sejarah Perkotaan. *Jurnal Artefak*, 9 (1), 49 - 60